

BAB IV

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari kajian hasil penelitian ini. Bab ini memaparkan kesimpulan peneliti tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Di Kabupaten Pemalang Tahun 2013-2015.

Selain kesimpulan bab ini juga memberikan saran kepada pemerintah, stakeholder, dan juga masyarakat untuk lebih meningkatkan kepedulian terkait dengan memberi perlindungan bagi perempuan dan anak, khususnya mereka yang merupakan korban kekerasan.

4.1. Simpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Di Kabupaten Pemalang masih banyak perempuan menjadi korban kekerasan terutama kekerasan Fisik/KDRT yang terjadi di Rumah Tangga dengan pelaku yang tidak lain merupakan suami/istri dari korban kekerasan tersebut. Selain kekerasan terhadap perempuan, terdapat pula korban kekerasan anak yang mengalami kekerasan seksual dan kebanyakan mengalami kekerasan di ruang publik yang dilakukan oleh pelaku orang dewasa dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar yang sebagian besar pelaku merupakan orang lain bagi korban atau pelaku tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban anak.

Upaya penyelenggaraan perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Sosial KBPP bertujuan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk saat ini adalah dengan dilakukannya sosialisasi secara masif dan berkelanjutan yang setiap tahunnya dilaksanakan 1-2kali, pembentukkan kelembagaan

sampai ke tingkat desa untuk memperluas jaringan sosialisasi, dan juga KIE menggunakan media sebagai ajakan atau upaya pencegahan melalui pamflet, poster, baliho, dll. Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya belum dapat mengajak mitra atau kerjasama dengan komunitas (LSM) non-*plat merah*, dan juga belum dapat mengandeng sektor swasta atau dunia usaha selain dalam bidang percetakan yang mengeluarkan produk sebagai KIE melalui media cetak berupa pamflet, poster, dll.

Upaya Penanganan dilaksanakan oleh Dinsos KBPP Kabupaten Pematang Jaya melalui PPT Jayandu Widuri. PPT Jayandu Widuri memiliki lima layanan yang tersedia untuk menangani korban kekerasan dan layanannya terbagi di tiap instansi sesuai dengan TUPOKSInya masing-masing. Seperti Layanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas, layanan hukum akan dilayani dari aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan), layanan pemulangan korban di Disnaker, lalu layanan rehabilitasi sosial di Dinsos, layanan bantuan hukum di pengadilan termasuk juga pendampingan ada pada PPT Jayandu Widuri. Lima layanan yang tersedia di PPT Jayandu Widuri diberikan untuk korban kekerasan sesuai dengan kebutuhan dari korban itu sendiri setelah melapor dan dilaksanakan screening.

2. Alokasi anggaran program pencegahan dan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Pematang Jaya pada tahun 2013-2015 belum memadai untuk dapat melaksanakan upaya penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak. Berdasarkan data alokasi anggaran yang ada, masih terdapat kegiatan yang belum bisa dilaksanakan pada tahun tertentu sehingga upaya penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak belum optimal. Dilihat dari sisi pencegahan dan dari sisi peningkatan layanan yang diberikan, upaya pencegahan yang dilaksanakan masih belum optimal, dibuktikan dengan masih adanya jumlah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa

kegiatan yang kaitannya dengan upaya pencegahan belum dapat dilaksanakan rutin setiap tahunnya. Sehingga upaya pencegahannya masih belum optimal. Lain halnya dengan upaya penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak yang sudah cukup optimal, dilihat dari banyaknya laporan yang masuk yaitu baik laporan yang datangnya dari masyarakat sekitar atau laporan yang berasal dari korban itu sendiri, sehingga korban dapat segera dibantu dengan layanan yang tersedia.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diperlukan rekomendasi langkah-langkah yang mungkin bisa digunakan untuk mencapai keberhasilan dalam upaya penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Pemalang. Adapun langkah-langkah yang mungkin bisa digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu meningkatkan upaya pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak baik melalui sosialisasi, KIE, melakukan mitra dengan dunia usaha, melakukan mitra dengan organisasi masyarakat, dll.

Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu melakukan penambahan anggaran terkait Upaya Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Sehingga selain upaya penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan bisa tingkatkan lagi, sarana prasana yang dinilai masih kurang memadai bisa diperbaiki dan dicukupi.